

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG
DILAKUKAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN**

Oleh :

**Aram Munte
41151010150 133**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aram Munte
NPM : 4115 1010 150 133
Program kekhususan : HukumPidana

Judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas sakhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism*, apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikianlah surat pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Salam sejahtera bagi kita semua...

Bandung, 25 Juni 2020

**Aram Munte
41151010150 133**

ABSTRAK

Sistem penegakan hukum Kehutanan yang dilakukan oleh Pembantu Pegawai Negeri Sipil PPNS dari KLHK dan Satgas Kehutanan, membutuhkan *practice of political will*. Tidak adanya penegakan hukum atas adanya delik pembakaran hutan, disebabkan oleh adanya kesenjangan regulasi dan moralitas aparat penegak hukum, dflapangan, tanah dan hutan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, dengan kesenjangan penegakan hukum tersebut, maka judul ini membawa penulis untuk membatasi identifikasi masalah untuk diteliti. batasan identifikasi masalah tersebut adalah mengenai subjek badan hukum korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan menggambarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Penelitian ini dimulai dari meneliti dan menghimpun informasi korporasi kemudian menganalisa masalah dan menjawab permasalahan hukum, kemudian menyimpulkannya

Hasil penelitian menyimpulkan tentang Penegakan hukum yang tidak efektif, tumpang tindih antara, regulasi perizinan, Lingkungan hidup, Mineral dan batubara menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut, dan Upaya Penegakan Hukum yang apaling efektif bagi korporasi adalah diupayakan dan dibentuk aturan tentang *recovery* perbaikan atau pertanggungjawaban yang dibebankan pada korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sebagai perbandingan dalam aturan tambang diberlakukan upaya reklamasi, sebagai upaya *recovery* atau memulihkan lahan kedalam keadaan semula setelah *contract* PMA (HPH) habis. Mengingat sanksi denda, administrasi dan ganti rugi, bahkan pencabutan izin, sulitnya tahap penyidikan pada korporasi PMA sangat sulit dilakukan, *bargaining* Badan Badan perizinan usaha modal asing berkembang sangat mendominasi segala aspek. upaya *corporate social responsibility* pun sudah pasti dilakukan, namun efektifitas nya pun tidak berlaku sffektif. Saran Penulis atas hasil penelitian, agar pemerintah perlu meningkatkan bargaining kontrak modal asing yang memberlakukan *recovery* atau pemulihan lahan pada tahap semula, mengingat upaya penegakan dan pertanggungjawaban hukum telah tidak efektif untuk dilakukan. Regulasi Minerba yang baru (disahkan pada 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah). Pengeshan ini dilakukan secara parsial tanpa menghubungkan dengan undang undang kehutanan, yang perlu dilakukan revisi dan harus menyeterakannyaUpaya Reklamasi untuk mengembalikan fungsi hutan, pengurusan hutan, perencanaan hutan, pengelolaan hutan,

ABSTRACT

The law enforcement system is carried out independently by the agrarian ministry and spatial planning and the BPN, so it needs a supervisory and law enforcement role in other ministries such as the ministry of forestry, the environment, the village ministry and other ministries related to forest fires, the occurrence of gaps / gaps regulations and practices in the case of inseparable land and forests, with gaps in land policy in deciding ownership status (Article 5 of the Forestry Law) on state forests and customary forests, leading writers to limit the identification of problems to be investigated, identification limits the issue is Can Corporations Conducting Forest and Land Burning Legally Responsible According to Law No. 41 of 1999 concerning Forestry? And How is the Law Enforcement Efforts Against Corporations Who Burn Forest Under Law No. 41 of 1999 concerning Forestry?

The research method used by the author is to use the normative juridical method, with the research specification in this writing is analytical descriptive, by describing Law No. 41 of 1999 concerning forestry. This research starts from researching and collecting corporate information then analyzing problems and answering legal problems, then concluded it

The results of the study conclude that ineffective law enforcement, numerous regulations on forestry, and law enforcement efforts that are most effective for the corporation are endeavored and rules are set for recovery recovery or accountability that is imposed on the corporation that carries out forest and land burning. As a comparison in the mining regulations, a reclamation effort is applied, as an effort to recover or restore the land to its original state after the PMA (Forest Concession) contract is used up. Considering that efforts to compensate, criminal and revoke PMA business licenses are very difficult because of the collision with the permits of the foreign capital business licensing agencies. In developing countries, corporate social responsibility efforts are certainly done, but the effectiveness, the advice of this research is that it is recommended that the government needs to increase the bargaining of foreign capital contracts that impose land recovery at the initial stage, bearing in mind that law enforcement and accountability efforts have been ineffective The new Minerba Regulation (ratified on January 12, 2009 and earlier on December 16, 2008 was jointly agreed between the Parliament and the Government). This saving is done partially without linking to the forestry law, which needs to be revised and must equalize the Reclamation Efforts to restore forest functions, forest management, forest planning, forest management

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua..

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN”

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku pembimbing, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H.,selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hermawati RAS, S.H., M. Si.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung, sekaligus dosen penguji.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selakuWakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung,sekaligus ketua dosen penguji.

5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung, sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis.
7. Bapak Rachmat Suharmo, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum LanglangbuanaBandung.
17. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, permohonan maaf dan terima kasih atas dukungannya.

Secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Saoloan Munte dan Ibu Tirayun Simanjorang, serta istri,

Susanny Girsang, dan penulis persembahkan Tugas Akhir penulis pada kedua anak tercinta, Gomgom Baringin Christoper Munthe dan Sarah Tioma Angelina Munthe. Dan beserta seluruh keluarga besar, dan abang penulis, Jumintar Dalimunthe S.H., untuk segala kasih sayang dan doa restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan, khususnya kelas C1 angkatan tahun 2015 yang selalu menjadi teman konsultasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana Bandung.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi di bidang hukum Pidana.

Bandung, Juni 2020

Penulis,
Aram Munte
41151010150 133

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Tahap Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	20
6. Lokasi Penelitian.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

A. Hukum Kehutanan.....	22
1. Pengertian Hukum Kehutanan	22
2. Antisipasi Pencegahan Tindak Pidana.....	25
3. Landasan Teori Hukum Kehutanan.....	31
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana.....	32
C. Pertanggungjawaban Pidana Indonesia.....	38
D. Subjek Hukum Pertanggungjawaban	53
1. Subjek Tindak Pidana.....	53
2. Subjek Hukum Koorporasi.....	54
E. Kejahatan Koorporasi.....	56
F. Teori <i>Conditio Sine Quanon</i>	72
G. Komitmen Hukum Organisasi Pengusaha Sawit.....	77
H. Korporasi Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	85

BAB III OBJEK PENELITIAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

A. Korporasi Sebagai Pelaku Delik Pembakaran Hutan	90
1. Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN Pn.Jkt.Pst.....	90
2. Putusan Nomor : 228/Pid. Sus/2013/PN Plw.	91

B. Subjek Hukum Perorangan Sebagai Pelaku.....	92
1. Putusan Nomor 686/Pid.Sus/LH/2019/PN.....	92
2. Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2018/PN Palangkaraya.....	94
3. Putusan Nomor : 139/PID.SUS-LH/2017/PT.....	95

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

A. Koorporasi Sebagai Pelaku Kasus Pembakaran.....	98
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Koorporasi.....	108

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDP PENULIS**